



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN UJICOBA MODEL-MODEL
KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR

Langkah Ke: 3

KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM

2007



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENGEMBANGAN DAN UJICoba MODEL-MODEL
KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR**

Langkah Ke: 3

KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM**

2007

PENGEMBANGAN DAN UJICOBA MODEL- MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

LAPORAN KEGIATAN LANGKAH 3

Kajian Kebutuhan Lapangan

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, yaitu dalam pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang juga ditegaskan dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “ setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di *daerah terpencil atau terbelakang*, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan *tidak mampu dari segi ekonomi* sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki *kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran* karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang dikarenakan sosial ekonomi rendah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang utamanya adalah melakukan kajian konsep tentang pendidikan layanan khusus. Kajian ini melibatkan para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam mengupas berbagai persoalan pendidikan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut. Kajian ini juga melibatkan para pakar dan praktisi berbagai keahlian untuk mencari bentuk-bentuk atau model-model kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan persoalan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dalam proses pengembangan model kurikulum layanan khusus ini diperlukan kajian yang cermat dan tepat sasaran, sehingga untuk kebutuhan validitas data dan model yang dihasilkan, para pengembang kurikulum ini harus tinggal/menenetap di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum yang sesuai untuk kebutuhan layanan khusus di tingkat pendidikan dasar.

C. Hasil yang Diharapkan

Serangkaian kegiatan ini akan menghasilkan 4 model kurikulum pendidikan layanan khusus untuk jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- a. Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah terpencil
- b. Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan
- c. Model kurikulum untuk peserta didik sosial-ekonomi rendah
- d. Model kurikulum untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari kerja per tahapan pelaksanaan dengan inti kegiatan dalam bentuk Workshop kerja kelompok, kerja individu, dan diskusi fokus.

E. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Waktu, tempat dan peserta kegiatan terlampir

F. Daftar Acara

Susunan acara kegiatan adalah sebagai berikut:

WAKTU	ACARA	Keterangan
Hari I	<ul style="list-style-type: none">• Pengarahan dari Pimpinan• Penjelasan kegiatan dari koordinator• Diskusi• Tanya Jawab	Pusat Kurikulum Penanggung Jawab Kegiatan
Hari II	<ul style="list-style-type: none">• Kerja individu/kelompok• Pembahasan	Peserta
Hari III	<ul style="list-style-type: none">• Kerja individu/kelompok	Peserta
Hari IV	<ul style="list-style-type: none">• Progress Check• Diskusi	Tim Pusat Kurikulum
Hari V	<ul style="list-style-type: none">• Penyempurnaan• Penutupan	Peserta

G. Daftar Bahan

Kegiatan ini menggunakan beberapa bahan antara lain:

1. ATK (Ball point, map, kertas untuk print out hasil)
2. Referensi yang relevan

H. Hasil yang Dicapai

Terlampir

LAMPIRAN



PUSAT KURIKULUM
BALITBANG, DEPDIKNAS
2007

KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH TERPENCIL

I. PAPARAN AHLI

Uraian paparan ahli tentang Pendidikan Layanan Khusus Daerah Terpencil, sebagai berikut:

- Adanya daerah terpencil karena keadaan geografis Indonesia, sehingga ada daerah perkotaan, daerah pedesaan, maupun daerah pedalaman.
- Kategori terpencil umumnya sulit akses, sulit komunikasi dan sulit transportasi. Suatu daerah terpencil akan berubah seiring dengan perubahan jaman. Misalnya, dulu di tahun 1960 an Depok itu termasuk daerah terpencil, tetapi sekarang Depok bukan terpencil lagi tetapi sudah menyamai Jakarta. Di tahun 1960 an Ancol itu termasuk terpencil dan terrenal dengan tempat hantu buang anak, sekarang tidak lagi. Perjalanan ke Pulau Seribu dulu perlu 8 jam, sekarang sudah dapat dicapai dalam 1 jam.
- Sekolah-sekolah di daerah terpencil sekarang ini sudah banyak. Otonomi daerah seharusnya lebih memberikan kesempatan untuk lebih mengembangkan pendidikan terpencil.
- Keadaan sekolah di daerah terpencil, seperti berikut:
 - a. Sarana prasarana terbatas dan jauh dari memadai. Sekolahnya jauh dan biasanya kelasnya hanya dua atau tiga. Ada sekolah di gunung dengan atap rumbia.
 - b. Ketenagaan guru terbatas. Disekolah terpencil guru yang tamat D2 bisa dihitung dengan jari. Guru di daerah terpencil jangan dilihat kualitasnya, karena sudah bersedia jadi guru honda atau guru yamaha di daerah terpencil sudah sangat bersyukur.
 - c. Lingkungan/keadaan geografis. Dengan keadaan geografis menyebabkan lahirnya anak petani, anak nomaden, anak peladang, anak transmigran. Maksudnya masih ada persepsi orangtua bahwa anak harus bantu orang tuanya bekerja. Kepedulian orang tua akan pendidikan anaknya masih kurang, orang tua di daerah terpencil umumnya tidak merasa gelisah jika anaknya tidak bersekolah.
 - d. Pembinaan pendidikan masih kurang. Pengawas dan kepala dinas belum tentu muncul dalam dua bulanan, karena untuk mencapai daerah terpencil perlu waktu perjalanan yang lama, kadang bisa mencapai 1 minggu untuk mencapainya.

- e. Manajemen sekolah. Umumnya manajemen di sekolah terpencil ditangani oleh kepala sekolah dan guru yang ada. Satu sekolah biasanya dua tenaga pendidik dan mereka mampu mengatasinya. Sejauh ini manajemen sudah baik.
- Untuk memajukan persekolah di daerah terpencil sudah dilakukan berbagai cara, seperti:
 - a. mencetak buku modul pelajaran dan mendistribusikannya. Modul sudah didistribusikan ke 4000 daerah terpencil.
 - b. Pemberian blok-grant pada SD-SD terpencil, sebesar Rp.10.000.000,- per sekolah.
 - c. Rapat koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten di daerah terpencil.

II. DISKUSI FOKUS

Secara garis besar gambaran umum pendidikan di daerah terpencil dapat dipetakan sebagai berikut:

KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses belajar sulit, karena akses informasi dari Indonesia/kota susah. ▪ Lokasi sulit dijangkau ▪ Keadaan alam yang tidak selalu menunjang, sehingga penduduk suka hidup berpindah-pindah (nomaden) ▪ Transportasi sulit ▪ Komunikasi sulit ▪ Keadaan penduduk umumnya lemah ekonomi ▪ Kepedulian orangtua akan pendidikan masih kurang
KRITERIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpencil di perbatasan ▪ Terpencil tidak diperbatasan
MASALAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana prasarana minim/kurang ▪ Sumber belajar kurang/minim ▪ Biaya pendidikan kurang/sulit ▪ Lingkungan yang kurang menunjang ▪ Minat belajar kurang ▪ Tenaga pengajar terbatas ▪ Pembinaan dari pemerintah masih kurang
POTENSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tokoh masy (non formal) ▪ Pemda setempat (formal) ▪ Adanya sekolah
PENANGANAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ modul ▪ kit pembelajaran ▪ tatap muka
MODEL PEMBELAJARAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model paket

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekolah satu atap (ada sd,smp,sma) ▪ Multi grade teaching (one teacher school) ▪ Parenting school (memberikan motivasi agar orangtua mendukung anaknya sekolah)
--	---

III. KISI-KISI INSTRUMEN KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

Informasi yang perlu dijangkau untuk mengembangkan model kurikulum di daerah terpencil, sebagai berikut:

- Responden:
 1. Kepala Dinas
 2. Kepala Sekolah
 3. Guru
 4. Orang tua
 5. Tokoh masyarakat (misalnya TNI)
 6. Peserta Didika

- Identifikasi Kebutuhan

INDIKATOR	DATA YANG DIPERLUKAN	SUMBER DATA	ALAT PENGUMPUL DATA
Satuan Pendidikan	8 standar (PP 19), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kurikulum ▪ fasilitas yang dimiliki sekolah ▪ jumlah siswa ▪ jumlah guru ▪ metode pembelajaran ▪ standar pembiayaan ▪ jumlah lulusan sekolah 3 tahun terakhir ▪ Jumlah anak usia sekolah ▪ Sebaran anak usia sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kepala sekolah ▪ guru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuesioner (yang pengisiannya dibantu dengan melakukan wawancara) ▪ Panduan Observasi
Potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah peserta didik di daerah (lulusan SD, lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, lulusan SMP, dan lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA) ▪ kepedulian masyarakat (motivasi, bantuan dana) ▪ Peran pemda (kebijakan pendidikan) ▪ Peran instansi lain (koramil/kodim, perusahaan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan (Kasidikdas kecamatan) ▪ Sekolah (kepala sekolah/guru) ▪ Orang tua ▪ Tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuesioner (yang pengisiannya dibantu dengan melakukan wawancara) ▪ Panduan Observasi

	swasta, LSM) ▪ Budaya setempat		
Peserta Didik	▪ Latar belakang peserta didik ▪ aktivitas peserta didik di sekolah ▪ aktivitas peserta didik di luar sekolah ▪ motivasi/minat belajar peserta didik	peserta didik	▪ Kuesioner ▪ Panduan Observasi ▪ Wawancara

IV. BAHAN REFERENSI

Bahan referensi yang diperoleh dari para nara sumber sebagai acuan kegiatan kajian konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Pulau Terpencil Di Daerah Perbatasan, oleh Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Terpencil, makalah presentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Antar Negara
2. Kebijakan Pemerintah Dibidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, makalah presentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Antar Negara
3. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan Antar Negara di Bidang Pendidikan, oleh Direktur Pengembangan Wilayah Depdagri, makalah presentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Antar Negara
4. Paradigma baru kelola pulau kecil, Harian Bisnis Indonesia 5 Juni 2005.
5. Standar Pelayanan Operasional Sekolah Dasar dengan Layanan Khusus, Direktorat TK dan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2004
6. Standar Prosedur Operasional Kelas Layanan Khusus di Sekolah Dasar "Kelas Layanan Khusus", Direktorat TK dan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, 2004
7. Paket Pelatihan-2 Pembelajaran Kelas Rangkap, Bahan Penunjang untuk Fasilitator, MBE 2006 (Draft)

HASIL KAJIAN LAPANGAN BAGI PESERTA DIDIK yang MENGALAMI KESULITAN BELAJAR

1. Yang dimaksud dengan anak/peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
 - Anak yang mempunyai masalah belajar karena faktor internal (kurangnya perhatian, persepsi, dan masalah pemrosesan informasi) sehingga ada perbedaan antara potensi yang dimiliki dan prestasinya.
 - Gangguan penyerta pada anak berkesulitan belajar biasanya berupa gangguan emosional (salah satunya karena faktor gangguan/hambatan persepsi) – faktor eksternal.
2. Mengidentifikasi anak/peserta didik yang berkesulitan belajar.
Dilakukan dengan beberapa tahap:
 - Screening (penyaringan)
Bisa dilakukan oleh guru berguna untuk menemukan/menandai siswa yang di duga sebagai anak yang berkesulitan belajar.
 - Guru merekomendasikan peserta didik tersebut ke tenaga ahli
 - Penentuan apakah peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Dilakukan oleh Ahli (psikolog, medis).
3. Menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
 - Penyiapan situasi-kondisi belajar anak
 - Beberapa proses pembelajaran dengan pendekatan, antara lain:
 1. Developmental (menelusuri problem anak)
 2. Behaviouristik (menangani problem belajar secara langsung pada masalahnya - Remedial Teaching)
 3. Kognitif (mengajak anak memahami kelebihan dan kelemahan dirinya, mengajak anak memahami "cara belajar")
 - Guru :
 1. Guru khusus
 2. Guru Pendamping khusus (kelas reguler)
 - Terapi (Psikolog, medis)
4. Model kurikulum yang diharapkan.
 - Kurikulum yang mudah dan dapat dipahami.
 - Kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi anak.
5. Perbedaan antara definisi "berkesulitan belajar" dengan 'Problem belajar".

- Berkesulitan belajar disebabkan oleh faktor internal seperti persepsi, lambatnya pemrosesan informasi, dll.
 - Problem belajar disebabkan oleh faktor eksternal/lingkungan.
 - Kondisi anak berkesulitan belajar bisa menjadi lebih berat ketika ia juga mengalami problem belajar.
6. Gangguan penyerta pada anak berkesulitan belajar.
- Penggunaan istilah "gangguan penyerta" perlu ditegaskan bahwa istilah tersebut tidak bermakna "gangguan yang ringan". Karena gangguan penyerta ini bisa sangat menyulitkan dalam proses penanganannya.
 - Sebelum proses pembelajaran (terutama di kelas awal), anak perlu dibekali dengan kemampuan pre-akademik (atensi, persepsi visual, dll)

ASPEK-ASPEK	PERMASALAHAN KESULITAN BELAJAR
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak yang mempunyai masalah belajar karena faktor internal (kurangnya perhatian, persepsi, dan masalah pemrosesan informasi) sehingga ada perbedaan antara potensi dan prestasinya. ▪ Gangguan penyerta biasanya berupa gangguan emosional (disebabkan gangguan/hambatan persepsi) – faktor eksternal
Jenis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesulitan Membaca ▪ Kesulitan Menulis ▪ Kesulitan Berbicara ▪ Kesulitan Berhitung
Assesmen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Screening (penyaringan) Berguna untuk menemukan/menandai siswa yang di duga sebagai anak yang berkesulitan belajar. Dilakukan oleh Guru (informasi juga dapat diperoleh melalui orang tua) ▪ Penentuan apakah siswa tersebut berkesulitan belajar atau tidak. Dilakukan oleh Ahli (psikolog, medis, dll).
Penanganan, antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan situasi – kondisi belajar anak ▪ Beberapa proses pembelajaran dengan pendekatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Developmental (menelusuri problem anak) 2. Behaviouristik (Remedial Teaching) 3. Kognitif ▪ Guru : 1. Guru Khusus 2. Guru Pendamping Khusus – Kelas Reguler ▪ Terapi (Psikolog, Medis)
Model	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurikulum yang dimodifikasi Aspek-aspek yang dimodifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan

	<ol style="list-style-type: none">2. Materi3. Strategi4. Evaluasi <ul style="list-style-type: none">▪ Sekolah Khusus▪ Sekolah Umum : 1. Kelas Khusus 2. Kelas Reguler
--	--

MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS DI DAERAH PERBATASAN

I. KERJA KAJIAN LAPANGAN

1. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun perbatasan laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga (3) pulau, empat (4) propinsi, dan lima belas (15) kabupaten/kota masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh (10) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Republik Pulau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guine (PNG).
2. Kondisi pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) di daerah perbatasan cenderung dekat dengan pemahaman mengenai SD daerah terpencil, miskin dan penuh ketidakberdayaan dalam segala hal. Ketidakberdayaan tersebut dapat dilihat dari kondisi gedung, sarana dan prasarana pembelajaran hingga kepada manajemen sekolah secara keseluruhan yang pada akhirnya telah menunjukkan sosok sekolah sebagai tempat yang kurang bermartabat.
3. Keberdayaan SD di daerah perbatasan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis, kultur, politik, dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Karena itu kadar perhatian dan keberpihakan masyakat di daerah perbatasan terhadap keberadaan SD sangat variatif untuk masing-masing daerah. Hal ini memperkuat perlunya perhatian pemerintah terhadap pendidikan SD di daerah perbatasan yang kondisi sosial ekonomi mayarakatnya memprihatinkan.
4. Ketersentuhan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota terhadap keberadaan SD perbatasan masih belum

maksimal. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan SD selama ini masih terfokus dan memprioritaskan pada SD di kawasan yang mudah dan dapat terjangkau, walaupun permasalahannya juga masih cukup pelik dan mendasar. Permasalahan dimaksud seperti kondisi gedung yang cukup memprihatinkan hingga kepada persoalan pengelolaan sekolah yang serba berjalan apa adanya.

5. Keterbatasan sarana transportasi maupun komunikasi antar daerah pada SD perbatasan telah memberi akibat kepada lambannya para pembina maupun pengelola SD dalam mengimplementasikan program-program pendidikan sebagaimana yang dituntut dalam target pencapaian pelaksanaan kegiatan sekolah. Terlebih lagi bila upaya tersebut ditujukan dalam upaya mengejar ketertinggalan program sebagaimana layaknya dilakukan oleh sekolah dasar pada umumnya.
6. Penyelenggaraan pendidikan baik yang menyangkut pengelolaan sekolah, kegiatan pembelajaran maupun kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan di sekolah perbatasan pada umumnya masih mencerminkan pengelolaan pendidikan yang serba apa adanya dan jauh dari upaya inovasi ataupun usaha kearah peningkatan mutu. Semua itu terujud sebagai konsekuensi dari akibat keadaan seperti; kualitas pembina/pengelola pendidikan yang lemah, keberpihakan pemerintah daerah terhadap sekolah perbatasan yang serba apa adanya, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang rendah serta keterbatasan fiskal dan regulasi.

II. DISKUSI FOKUS

Secara garis besar gambaran umum pendidikan di daerah terpencil dapat dipetakan sebagai berikut:

	PERBATASAN
KARAKTERISTIK ISTIK	▪ Akses informasi dari Indonesia sulit, maka akses belajar susah

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara geografis di perbatasan negara sulit dijangkau ▪ Alam yang tidak selalu menunjang (berpindah2) ▪ Transportasi dan komunikasi sulit ▪ Lemah ekonomi ▪ Perbatasan maju dan perbatasan terpencil/tertinggal ▪ Minat belajar (pembinaan)
KRITERIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbatasan maju ▪ Perbatasan tertinggal
MASALAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ideologi kebangsaan ▪ Sarana prasarana ▪ Sumber belajar ▪ Pembiayaan ▪ Minat belajar ▪ Lingkungan ▪ Tenaga pengajar ▪ pembinaan
POTENSI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ABRI
PENANGANAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kebangsaan ▪ life skill ▪ multicultural ▪ fasilitas khusus
MODEL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Model paket ▪ Sekolah satu atap (ada sd,smp,sma) ▪ anak bervariasi, one teacher school ▪ Parenting school

III. KISI-KISI INSTRUMEN

Informasi yang perlu dijaring untuk mengembangkan kurikulum pendidikan layanan khusus di daerah perbatasan, sebagai berikut:

- **Responden:**
 7. kepala dinas
 8. kepala sekolah
 9. guru
 10. orang tua

KISI-KISI KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

Indikator	Data yang diperlukan	Sumber data	Alat pengumpul data
Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - 8 standar: - kurikulum - fasilitas yang dimiliki sekolah - jumlah yang dimiliki sekolah - jumlah siswa - jumlah guru - metode pembelajaran - standar pembiayaan - jumlah lulusan sekolah 3 tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> - kepala sekolah - guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner - observasi - wawancara
Potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah peserta didik di daerah (lulusan SD, lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, lulusan SMP, dan lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA) - kepedulian masyarakat (motivasi, bantuan dana) - Peran pemda (kebijakan pendidikan) - Lingkungan (perusahaan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasidikdas - Kecamatan - Orang tua - Tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner - Observasi - wawancara
Peserta Didik	<ul style="list-style-type: none"> - aktivitas peserta didik di sekolah - aktivitas peserta didik di luar sekolah - latar belakang peserta didik 	peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner - observasi - wawancara

11. tokoh masyarakat

12. siswa

13. TNI

• **IDENTIFIKASI KEBUTUHAN**

INDIKATOR	DATA YG DIPERLUKAN	SUMBER DATA	ALAT PENGUMPULAN DATA
Satuan Pendidikan	- 8 standar: PP 19 (isi, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, penilaian	- kepala sekolah	- kuesioner - paduan observasi
Potensi daerah	- jumlah sekolah per kecamatan - sebaran sekolah - kepedulian masyarakat - peran pemda - peran instansi lain (koramil/kodim) - budaya setempat	- dinas - dinas tokoh masyarakat - kepala sekolah - dinas +tokoh masyarakat + kepala sekolah - tokoh masyarakat + guru	Semua dengan kuesioner + wawancara
Peserta didik	- jumlah anak usia sekolah - sebaran anak usia sekolah - motivasi/minat - aktivitas anak - latar belakang orang tua anak	- UPTD kecamatan - UPTD kecamatan - Guru+tm+ortu - Anak+ortu - Ortu+kepsek	SEMUA kuesioner

IV. BAHAN REFERENSI

Bahan referensi yang diperoleh dari para nara sumber sebagai acuan kegiatan kajian konsep sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal
- Strategi pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan antar Negara di bidang pendidikan
- Problema penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan
- Prioritas program daerah perbatasan
- Kebijakan dan program pemberdayaan pulau terpencil di daerah perbatasan
- Pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan
- Gambaran umum wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
- Perbatasan NKRI dan PPKT

Hasil Diskusi 1

Pak Yuni (Kasi Kur Dispen Kab.Nunukan) memberikan gambaran daerah yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia adalah Kec.Krayan dan Sebatik .Di kedua daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi letak geografis . Kecamatan Krayan terdapat 27 SD. Dan di SD 08 sudah berdiri SD/SMP satu atap dan sudah berjalan 1 tahun. Setiap Kampung saling berjauhan , rata-rata ditempuh dengan perjalanan 1 hari dan termasuk daerah terpencil.Alat transportasi hanya bisa ditempuh dengan kendaraan laut dan pesawat belum ada jalan darat karena sebagian besar wilayahnya masih hutan belantara. Harga tiket untuk sekali jalan Rp.240.000 / orang,sehingga daerah ini perlu pertimbangan khusus untuk dikunjungi maupun mengundang guru-guru dari daerah tersebut

Dari hasil diskusi terbatas tersebut disusun strategi untuk mengunjungi kecamatan sebatik karena bisa ditempuh dengan menggunakan speedboat dengan harga tiket Rp.100.000/orang pihak Dinas akan mencoba megontak kepala sekolah maupun guru yang ada di sebatik. Informasi sementara di kecamatan ini terdapat 20 SD setiap desa ada 1 SD dengan jumlah murid rata-rata sedikit. Daerah Sebatik ini terbagi 2 bagian, ada Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia pemisahannya berupa patok-patok yang bias dipindah-pindah menurut kebutuhan masyarakat setempat.Bagi penduduk Indonesia yang Tinggal di sebatik Malaysia telah berdiri sebuah sekolah layanan khusus atas gagasan Yayasan Humana (dari Belanda) yang selanjutnya dikelola oleh tenaga Guru honorer dari Dinas Pendidikan Kab.Nunukan, istimewanya sekolah ini didirikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun, tetapi tempat belajarnya tidak resmi sangat tergantung oleh situasi politik di selenggarakan di kolong-kolong rumah penduduk dan waktu belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan(semacam SD terbuka) baru setelah Kelas 6 yang akan Ujian Nasional di tarik ke Nunukan.

Menurut pengakuan Pak Yuni sosialisasi KTSP baru sampai Nunukan dan Sebatik ke kecamatan lain sosialisasi baru sebatas pengenalan KTSP saja.Kabar terakhir meski jadwalnya belum pasti, pemerintah pusat akan segera membangun sekolah perbatasan untuk anak-anak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Sebatik dan Nunukan. Menurut Wakil Bupati Nunukan Drs. Kasmir Foret MM yang dimuat di Koran lokal Metro Kaltara, akan dibangun diatas lahan seluas 2 hektar, masing-masing di

sebatik dan di Nunukan .”Pemerintah pusat sudah memprogramkan pembangunan sekolah perbatasan, tapi jadwal pembangunannya masih belum jelas.tapi PemKab Nunukan telah membebaskan lahan di masing-masing daerah lokasi sekolah perbatasan,”Selain untuk pembangunan gedung sekolah semua jenjang pendidikan (SD,SMP dan SMA sederajat),di lahan seluas 2 hektar tersebut,juga akan dibangun srama bagi para siswa.di katakana pula Dari pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo),Selasa (12/6) antara pemerintah provinsi Kaltim dan Pemkab Nunukan, dengan Pemerintah daerah sabah Malaysia,terungkap bahwa pemerintah Sabah tidak mau membangun sekolah untuk anak-anak TKI yang jumlahnya ribuan, namun pemerintah Malaysia akan membuka pintu sekolah-sekolah Malaysia selebar-lebarnya, untuk anak-anak TKI,” dengan catatan, hanya anak-anak TKI legal saja.Dimakudkan,anak-anak TKI yang memiliki dokumen resmi seperti surat lahir (akta kelahiran) dari pemerintah Malaysia.Jika anak-anak TKI tersebut tidak memiliki surat lahir,mka pemrintah Malaysia menganggapnya anak TKI illegal dn tidak akan memberi izin memasuki bangku sekolah Malaysia, apalagi membangun gedung sekolah untuk mereka (anak TKI illegal).

Hasil diskusi 2

Pak Johansyah (Kasi Kur Dispen Kab Nunukan) memberikan gambaran daerah perbatasan termaju di bidang pendidikan adalah di Kecamatan Sebatik Dalam dan Sebatik Luar. Sedangkan yang masih tertinggal adalah Kecamatan Krayan. Rencananya akan menuju ke dua daerah tersebut akan tetapi kondisi cuaca yang sangat buruk, hampir tiap hari hujan lebat sehingga jalan yang masih dalam pengerasan menjadi sulit dilalui dan sangat licin, akses menuju ke Kec Krayan hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang dan ongkos sekali jalan memerlukan biaya Rp.250.000/ orang maka diputuskan hari Sabtu akan menuju ke Kec. Sebatik.. Pak Johan sudah mempersiapkan orang-orang yang akan terlibat di 2 kec. Sebatik tsb. Tiba di P. Sebatik diskusi dilanjutkan lagi, di dapat beberapa keterangan penting mengenai kondisi daerah perbatasan, diantaranya:

- (1). Persoalan berawal dari tahun 2002 Kerajaan Diraja Malaysia membuat Undang-Undang baru di bidang Pendidikan yang mengakibatkan 33000 anak dari para TKI yang bersekolah di Sabah Malaysia drop out. Beberapa upaya telah dilakukan namun hanya bisa menyentuh sebagian kecil saja. Yayasan Humana hanya sanggup mengelola 5% dari 33000 dan timbul kendala baru ketika mereka kelas 6 untuk mengikuti Ujian Nasional mereka ditarik dulu ke Pulau Sebatik dan dititipkan di sejumlah SD dan ini memerlukan dana yang cukup besar.
- (2) Sudah ada upaya yang dilakukan oleh PEMDA Nunukan dengan Dirjen Mandikdasmen, yaitu mengirim Tenaga Guru Honorer yang ditempatkan di daerah Tawao (Negara Bagian Sabah) namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk melayani 33000 murid yang drop out tersebut.
- (3) Sekitar 80 % penduduk Tawao (Negara Bagian Sabah Malaysia) ini merupakan orang Indonesia juga umumnya banyak yang berasal dari Suku Bugis Makassar dan Dayak. Akses menuju Sabah ini mudah apalagi Penduduk asli Nunukan tidak perlu memakai Pasport cukup dengan kartu PLB saja mereka dapat memasuki daerah Tawao. Tawao merupakan Kota Pelabuhan sama seperti Nunukan namun lebih gemerlap dibanding dengan Nunukan. Kondisi ini menimbulkan daya tarik yang luar biasa bagi penduduk Indonesia untuk mencari pekerjaan (penghasilan) disana sehingga di kawasan sekitar Kab. Nunukan terutama di Pulau Sebatik berlaku 2 mata uang;

ringgit dan rupiah , perbandingannya 1 ringgit = Rp.2500,-. Ketika Krismon thn 1997 kalau daerah lain mendapat getah justru daerah Nunukan ini yang dapat berkah.

- (4) Akulturasi budaya yang terjadi di Sebatik menimbulkan seakan-akan terjadi penurunan nilai Nasionalisme Bangsa Indonesia, anak SD menggunakan Melayu Inggris

HASIL KEGIATAN KAJIAN LAPANGAN
PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR
BAGI PESERTA DIDIK SOSIAL EKONOMI RENDAH

1. SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah bagi peserta didik dengan sosial ekonomi rendah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dengan bersekolah di SMP Terbuka peserta didik lebih percaya diri dalam pergaulan, tidak canggung dalam berdiskusi, dan waktu belajar lebih fleksibel.
2. Banyak peserta didik lebih memilih bersekolah di SMP Terbuka daripada di SMP Reguler karena biaya pendidikan di SMP Terbuka gratis, hal ini sebenarnya menyalahi aturan mengingat peruntukan SMP Terbuka bagi peserta didik yang tidak mampu yang berusia 13 – 15 tahun maksimal 18 tahun.
3. Pola pendidikan di SMP Terbuka secara garis besar 4 hari belajar mandiri, dan 2 hari belajar dengan bimbingan (belajar di sekolah induk).
4. Secara garis besar peserta didik dengan social ekonomi rendah dapat di petakan sebagai berikut:
 - a. Karakteristik : - Orang tua siswa tidak memiliki pekerjaan tetap
- Pendapatan orang tua dibawah UMR/UMP
- BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- Informasi dan transportasi tidak terjangkau oleh mereka

- b. Masalah : - Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas
- Anak-anak usia sekolah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja membantu orang tuanya
- Biaya pendidikan
- Lingkungan
- c. Potensi : - Orang tua
- Motivasi
- Tokoh masyarakat
- Sekolah reguler
- d. Penanganan : - Modul
- Lifeskill
- Multikultur
- Beasiswa (grant)
- e. Model : - SMP Terbuka
- Paket A, B
- Parenting School (memberikan motivasi agar orang tua mendukung anaknya untuk bersekolah)

5. Model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar bagi peserta didik social ekonomi rendah sebaiknya mencakup:

a. Latar Belakang:

- Karakteristik sosial ekonomi rendah secara teori
- Karakteristik sosial ekonomi rendah menurut Bappenas
- Informasi dan transportasi yang tidak terjangkau

b. Masalah:

- Kesempatan yang terbatas

- Waktu belajar dan sekolah yang terbatas karena harus bekerja
 - Keterbatasan dana
 - Lingkungan yang tidak kondusif
- c. Alternatif pemecahan masalah:
- SMP regular dengan aturan khusus (Layak atau tidak menerapkan Multi Exit Multi Entry seperti di SMK untuk peserta didik yang bekerja membantu orang tua)
 - SMP Terbuka dengan pembelajaran menggunakan modul
 - Program keterampilan yang disesuaikan dengan potensi daerah
 - Beasiswa (perlu dijelaskan juga jenis beasiswa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa ini, serta siapa saja yang dapat memberikan beasiswa)
6. Mengingat keterbatasan fasilitas yang mendukung pembelajaran yang dimiliki peserta didik dengan sosial ekonomi rendah, perlu dipertimbangkan model pembelajaran yang cocok bagi mereka.
7. Bagaimanapun bentuk model yang dikembangkan tetap mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang telah dikeluarkan BSNP.

KISI-KISI KAJIAN KEBUTUHAN LAPANGAN

Indikator	Data yang diperlukan	Sumber data	Alat pengumpul data
Satuan Pendidikan	8 standar: - kurikulum - fasilitas yang dimiliki sekolah - jumlah siswa - jumlah guru - metode pembelajaran - standar pembiayaan - jumlah lulusan sekolah 3 tahun terakhir	- kepala sekolah - guru	- kuestioner - observasi - wawancara
Potensi Daerah	- jumlah peserta didik di daerah (lulusan SD, lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, lulusan SMP, dan lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA) - kepedulian masyarakat (motivasi, bantuan dana) - Peran pemda (kebijakan pendidikan) - Lingkungan (perusahaan)	- Kasidikdas kecamatan - Orang tua - Tokoh masyarakat	- Kuestioner - Observasi - wawancara
Peserta Didik	- aktivitas peserta didik di sekolah - aktivitas peserta didik di luar sekolah - latar belakang peserta didik	peserta didik	- kuestioner - observasi - wawancara

